

**ADVOKASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PARTISIPASI PRIA DALAM PROGRAM  
KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN BATUWARNO KABUPATEN  
WONOGIRI**

Ita Oktaviana, Retno Sunu Astuti, R Slamet Santoso  
**Departemen Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Population growth in Indonesia is increasing and uncontrolled, need to overcome it through family planning programs. However, in the implementation of the family planning program in Batuwarno District, Wonogiri Regency, male participation is still low. Whereas the Male Operation Method which is part of the Long Acting Reversible Contraceptive Method can reduce the rate of population growth. This study used qualitative research methods. The purpose is to analyze the policy advocacy of increasing male participation and its inhibiting factors. The theory used is theory advocacy by Ramaditya Rahardian. The results of the research are policy advocacy that implement through the Priyo Utomo group in Batuwarno sub-district has not succeeded in increasing male participation. The results of policy advocacy not as expected. The strategy of Communication, Information and Education, and socialization of Male Operation Method and use print media. The inhibiting factors are the religious, less of human resources, less of human resource, less of budget, less of coordination, and technical negligence. The researcher recommend is formulating a regulation for male participation so that can encourage increased male participation.*

**Keywords:** family planning, male participation, policy advocacy

**PENDAHULUAN**

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dan tidak terkontrol, akan menjadi masalah besar apabila tidak ditangani dengan baik. Indonesia berada pada tahap pertumbuhan penduduk yang tinggi dan dapat diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2020-2030. Keadaan ini perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk, hasilnya dapat berdampak positif

yaitu menjadi asset dalam pembangunan. Peningkatan mutu kehidupan atau kualitas penduduk telah diatur secara global dalam *Sustainable Development Goals (SDG's)* pada tujuan ke-3 yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Termasuk didalamnya kemitraan global keluarga berencana atau Family Planning. Sejalan dengan hal tersebut di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ketiga pada tahun 2018 yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Pulau Jawa, yaitu 34,55 juta jiwa (Sumber : Badan Pusat Statistik 2018). Peraturan tingkat provinsi yang mengatur mengenai Program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Jawa Tengah yaitu Peraturan Gubernur (PERGUB) No 77 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kampung Keluarga Berencana. Terkait dengan yang diteliti oleh peneliti mengenai Program Keluarga Berencana yang berfokus pada partisipasi pria.

Kabupaten Wonogiri menjadi kabupaten terendah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki peserta KB pria (MKJP) pada tahun 2020 yaitu sebanyak 195 partisipasi. Bupati Wonogiri mengesahkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Perkembangan Kependudukan Dan Keluarga Berencana.

Kecamatan Batuwarno menjadi salah satu kecamatan yang memiliki peserta KB MOP rendah. Penggunaan alat kontrasepsi antara pria dan wanita, didominasi wanita dalam partisipasinya. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, dari

1784 partisipasi KB di Kecamatan Batuwarno, hanya terdapat 5,74% partisipasi pria dan selebihnya yaitu 95,2 adalah partisipasi wanita. Pada tahun 2020 perbandingan penggunaan kondom 95,3% dan MOP sebesar 4,6% dari keseluruhan yaitu 86 partisipasi KB MOP dan kondom. Sesuai dengan fokus peneliti yaitu pada Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), terdapat 4 partisipasi pria KB MOP dari keseluruhan peserta KB pria dan wanita yaitu hanya 0,26%.

Berdasarkan data tersebut maka penelitian ini mencoba melihat advokasi kebijakan yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi pria dalam berKB. Advokasi kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak pihak yang mendesakkan adanya perubahan. Kecamatan Batuwarno telah dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pria dalam berKB, sebagai berikut :

a. Penyuluhan PPKBD

Dilakukan sebanyak 5 kali dalam satu bulan ke 5 Dusun di setiap Desa.

b. Penyuluhan SubPPKBD

Dilakukan sebanyak 1 kali dalam satu bulan ke masing-masing Dusun di Desa.

c. Memberikan motivasi

Memberikan motivasi KB MKJP kepada PUS di setiap Dusun masing-masing Desa,

d. Melakukan Safari KB, PLKB berkerjasama dengan Puskesmas memberikan KB gratis setiap bulan kepada PUS.

e. Pembuatan Kampung KB  
Bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat program KB.

Permasalahan ini mengenai bagaimana keberadaan advokasi kebijakan yang telah dilakukan di Kecamatan Batuwarno dalam mendorong kebijakan partisipasi pria dalam ber-KB. Faktanya kebijakan mengenai partisipasi pria dalam ber-KB di Kecamatan Batuwarno tidak memiliki kebijakan khusus. Upaya advokasi kebijakan telah dilakukan di Kecamatan Batuwarno namun belum dapat meningkatkan partisipasi pria, pertanyaan penelitian ini yaitu mengapa advokasi kebijakan belum mampu meningkatkan partisipasi pria dalam program KB di Kecamatan Batuwarno?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan advokasi kebijakan serta faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi pria pada Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Advokasi kebijakan menurut Ramaditya Rahardian (2020) yaitu bertujuan memperbaiki atau mengubah kebijakan sesuai dengan kelompok atau pihak yang mendesakkan adanya perubahan. Penelitian ini menunjukkan posisi advokasi kebijakan berada pada implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yang baik dipengaruhi oleh advokasi kebijakan.

Uraian dan alur kerangka konseptual dari advokasi kebijakan serta strategi yang disebut Best Practice Advokasi Terarah menurut R. Rahardian yaitu sebagai berikut:

- 1) Membentuk Koalisi dan Aliansi  
Pembentukan koalisi dan aliansi untuk mengakomodir serta berkomunikasi sesama individu dalam kelompok. Kelompok ini harus mampu bersinergi untuk menyamakan seluruh visi serta analisis tujuan dalam kegiatan advokasi.
- 2) Diskusi dan Menentukan Strategi  
Koalisi harus dapat menghasilkan output diskusi secara terukur, dinamis serta membuka pola pikir seluruh aktor. Strategi advokasi kebijakan dapat dilakukan melalui tahapan arus politik lapangan dan arus politik virtual.
- 3) Evaluasi Program dan Konsolidasi  
Adanya evaluasi, koalisi dapat mengetahui dimana letak sebuah

keberhasilan atau kegagalan dari advokasi kebijakan yang dijalankan. Selanjutnya melakukan konsolidasi untuk persiapan advokasi kebijakan di masa mendatang.

Hambatan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan advokasi kebijakan menurut Gede Sandiasa (2020) yaitu sebagai berikut:

- 1) Konstitusi, yaitu produk perundang-undangan yang ada dapat menghambat keberjalanan advokasi kebijakan.
- 2) Sistem, yaitu para penghambat biasanya berasal dari pihak yang merasa dirugikan jika advokasi berhasil mencapai tujuannya.
- 3) SDM, yaitu advokasi perlu dipahami, SDM harus mumpuni dalam melakukan perubahan kebijakan publik.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Fokus penelitian ini yaitu advokasi kebijakan peningkatan partisipasi pria dalam program KB. Lokus dalam penelitian adalah Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Metode teknik pengambilan data yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Subjek dalam penelitian ini yaitu DPPKBP3A, Dinas Kesehatan, PLKB Kecamatan Batuwarno,

peserta KB MOP dan bukan peserta KB MOP.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Advokasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Pria dalam Program KB di Kecamatan Batuwarno**

###### **a) Pembentukan koalisi dan aliansi**

Pembentukan Paguyuban Priyo Utomo tahun 2013 (SK tidak diperbarui), Kepala Desa Sumberjo sebagai ketua Priyo Utomo. Anggota dalam kelompok ini yaitu Kasi Keluarga Berencana (DPPKBP3A), 4 peserta KB MOP Kecamatan Batuwarno, PLKB, PPKBD, SubPPKBD, Perangkat Desa Sumberjo serta bekerja sama dengan Puskesmas dan Koramil.

Pemerintah Daerah berperan dalam mendukung melalui APBD. DPPKBP3A berperan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan kader. PLKB berperan sebagai orang yang terlibat langsung dengan masyarakat.

###### **b) Diskusi dalam menentukan strategi**

Strategi Priyo Utomo yaitu melakukan KIE dan memberi motivasi untuk berKB kepada masyarakat melalui pertemuan-

pertemuan yang ada di desa (PKK) Dusun (PKB), RT, Poktan yaitu Tri Bina terdiri dari BKB, BKR, dan BKL. Selain itu secara rutin PPKBD dan Sub PPKBD mengadakan pertemuan di desa setiap bulan 4 kali pertemuan.

Penggunaan media sosial dalam peningkatan partisipasi pria belum dilakukan secara maksimal, PLKB Kecamatan Batuwarno tidak memiliki official account di media sosial. Penggunaan media cetak berupa spanduk di kantor, leaflet, dan buku petunjuk.

**c) Evaluasi dan konsolidasi program**

Evaluasi PLKB dilakukan satu kali setiap bulan. Evaluasi PPKBD setiap 2 minggu sekali di kantor KB. Evaluasi bersama seluruh anggota PPKBD tersebut dilakukan setiap bulan sekali.

Pelaksanaan advokasi kebijakan di Kecamatan Batuwarno menunjukkan bahwa capaian partisipasi pria dalam berKB tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena tidak ada penambahan partisipasi di 2 tahun terakhir.

Persiapan advokasi masa datang yaitu tetap dilakukan KIE

mengenai KB MOP dengan mengaktifkan kegiatan-kegiatan KIE, agar sasaran yang direncanakan dapat tercapai.

**2. Faktor Penghambat Peningkatan Partisipasi Pria dalam Program KB di Kecamatan Batuwarno**

- a) Konstitusi. Belum adanya dasar hukum berupa regulasi yang mengatur tentang partisipasi pria di Kecamatan Batuwarno.
- b) Sistem. Kesulitan pada daerah-daerah yang menjadi bagian LDII, karena mereka menganggap bahwa KB adalah larangan. Upaya yang dilakukan melalui FAKSEDU, yaitu forum yang menyisipkan KIE di kegiatan beragama.
- c) SDM. Kekurangan SDM untuk PLKB di Kecamatan Batuwarno.
- d) Anggaran. Kekurangan anggaran (APBD) akibat pemangkasan selama pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan.
- e) Kurangnya koordinasi. Kurangnya koordinasi antara DPPKBP3A, PLKB dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, sehingga mengakibatkan

munculnya masalah dalam pendataan pengadaan barang yaitu alat kontrasepsi di kecamatan.

f) Kesalahan teknis.

Peserta KB MOP tidak melakukan persyaratan selama masih MOP baru sesuai dengan arahan dari PLKB, mengakibatkan kegagalan MOP.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai advokasi kebijakan peningkatan partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana di Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri, disimpulkan bahwa pembentukan koalisi Priyo Utomo di Desa Sumberjo Kecamatan Batuwarno yang melakukan advokasi kebijakan belum berhasil meningkatkan partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana. Strategi advokasi kebijakan yang dilakukan yaitu KIE dan penyuluhan ke kelompok pertemuan di desa. Peran media sosial dalam pelaksanaan advokasi kebijakan belum dimaksimalkan, tetapi menggunakan media cetak berupa poster, spanduk, leaflet dan buku petunjuk. Telah dilakukan evaluasi dalam proses advokasi kebijakan dengan hasil capaian partisipasi pria pada tahun 2020 tidak sesuai yang

diharapkan yaitu tidak ada penambahan partisipasi. Hal ini juga disebabkan Kecamatan Batuwarno belum memiliki kebijakan atau regulasi khusus mengenai partisipasi pria. Konsolidasi kembali dilakukan, untuk rencana selanjutnya sosialisasi dan KIE tetap dilakukan seperti sebelumnya.

Faktor penghambat dalam peningkatan partisipasi pria dalam program KB di Kecamatan Batuwarno yaitu

- a. Faktor Regulasi. Belum ada kebijakan atau regulasi yang mengatur mengenai partisipasi pria dalam program KB secara khusus.
- b. Faktor Agama. Masih terdapat masyarakat yang menganggap bahwa program KB adalah sesuatu yang dilarang dilakukan oleh agama.
- c. Faktor SDM. Kurangnya sumber daya manusia atau petugas lapangan KB (PLKB) karena di Kecamatan Batuwarno hanya terdapat 1 PLKB PNS dan 1 Non PNS.
- d. Faktor Anggaran. Adanya pemangkasan anggaran di masa pandemi Covid-19 sehingga berakibat kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan KIE program KB.

- e. Kurangnya koordinasi antar pihak pemerintah di kecamatan dan kabupaten.
- f. Kelalaian teknis oleh peserta KB yang tidak mengikuti sesuai dengan teknis MOP mengakibatkan gagalnya KB MOP.

## **SARAN**

- 1) Upaya pembenahan terhadap regulasi yang ada, disarankan pembuatan formulasi kebijakan mengenai peningkatan partisipasi pria dalam program KB dalam bentuk kebijakan atau regulasi khusus, sehingga dapat menjadi dasar hukum untuk mendorong peningkatan partisipasi pria dalam program KB.
- 2) Untuk mengatasi hambatan kurangnya koordinasi antar pemerintah dengan tokoh agama melalui FAKSEDU, maka disarankan kegiatan forum dilakukan lebih intensif dan dijadwalkan minimal 1 bulan sekali dilakukan sosialisasi melalui kegiatan beragama.
- 3) Kondisi kekurangan petugas lapangan KB, disarankan adanya penambahan sumber daya manusia di PLKB Kecamatan Batuwarno, agar pelaksanaan peningkatan KB pria

dapat dilakukan dengan fokus pada kegiatan-kegiatan tertentu.

- 4) Adanya kekurangan anggaran akibat pemangkasan APBD, maka disarankan penambahan dan pengalokasian anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan KIE, tidak hanya untuk kegiatan secara umum, namun kegiatan di fokuskan pada peningkatan peserta MOP.
- 5) Untuk mengatasi kurangnya koordinasi antar dinas, disarankan penjadwalan laporan rutin sesuai dengan keadaan di lapangan, dan perlunya evaluasi setiap sebulan sekali antar pihak, baik kecamatan dengan kabupaten atau antar dinas yang terlibat.
- 6) Untuk mengatasi kelalaian teknis bagi peserta KB baru, maka disarankan dilakukan pemantauan secara rutin kepada peserta KB MOP baru atau peserta melakukan laporan rutin dari teknis yang dilakukan. Misalnya dengan pembuatan jadwal laporan, sehingga dapat meminimalisir kegagalan proses KB MOP.
- 7) Untuk meningkatkan peran media sosial, perlu dilakukan kerjasama pemerintah dengan media.

Kerjasama ini berupa memaksimalkan pemanfaatan media sosial, dengan kampanye iklan atau video ajakan bahkan pembuatan tajuk berita utama di *Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok*, akan memudahkan dalam masyarakat memahami mengenai KB.

- 8) Untuk mengatasi metode sosialisasi yang dilakukan secara konvensional, maka disarankan perlu sosialisasi dan KIE dengan cara informal, tidak hanya formal. Agar komunikasi dengan sasaran berjalan dua arah. Misalnya pada tempat-tempat yang bisa untuk berkumpul para pria.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M. (2019). *Pengarusutamaan Gender dalam Implementasi Program KB di Kota Yogyakarta*. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 18(2), 167- 178.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri.  
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Bagus, Mantra Ida. 2004. *Demografi Umum*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- BKKBN. 2000. *Pedoman Penggarapan Peningkatan Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana*.
- Cicuh, Lilis H. *Info Demografi*. LD-FEB Universitas Indonesia. Volume 2 tahun 2019.
- Dewi, R. A., Rahmawati, A., & Hastuti, S. (2018). *Pengaruh Keterlibatan Suami Dalam Penyuluhan Terhadap Pengetahuan Dan Minat Penggunaan Alat Ontrasepsi Modern Pada Unmet Need Di Kampung Kb Di Kota Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta).
- DS, R. K., Sholeh, M. D., Puspitosari, H., Jannah, R., Rusdi, M., Fauzi, W. S., ... & Tifa, Y. (2012). *Audit Sosial dan Advokasi Kebijakan Publik yang Berbasis Kerelawanan*.
- Febriani, Y. D. (2015). *Persepsi Pria dan Hubungannya dalam Keikutsertaan Program KB Metode Operatif Pria di Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang*. Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang.
- Gede Sandiasa. 2020. *Materi Kuliah Komunikasi Advokasi Kebijakan : Pengertian, Proses dan Model Advokasi Kebijakan*. Universitas Panji Sakti. Diunduh dari <https://youtu.be/ozGckRnFq50>
- Katili, A. Y. (2016). *Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (Kb) Metode Kontrasepsi Operasi Pria (Mop) Di Kabupaten Boalemo*. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 3(1), 25-33.
- Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta : Penerbit Gaya Media.
- Lembaga Admisitrasi Negara. 2015. *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan*.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2011. *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan*. Jakarta : LIPI Press
- Pradipta, L. R., & Hidir, A. (2015). *Kontrasepsi Vasektomi pada Akseptor Kb Pria di Kecamatan Tapung Hilir* (Doctoral dissertation, Riau University).



- Program KB dan Kesehatan Reproduksi yang Berwawasan Gender.*
- Prasetyawan, A, dkk. 2013. *Implementasi Program Keluarga Berencana Pria di Kelurahan Sronдол Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang (Studi Kasus Penggunaan Medis Operasi Pria dalam Program Keluarga Berencana Pria).* Journal of Public Policy and Management Review, 2(4), 236-245.
- Rahardian, R. 2020. *Memahami Advokasi Kebijakan : Konsep, Teori, dan Praktik dalam Mewujudkan Kebijakan yang Berpihak pada Publik.* Yogyakarta : CV Budi Utama
- Rinaldi, D. Y. (2014). *Advokasi Bapemas dan KB Pada Pasangan Suami Istri pra-Kehamilan di Surabaya.* Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa S1 Sosiologi UNESA, 2(2).
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori Dan Aplikasi.* Yogyskarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung : Alfabeta
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan.* Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Suranto, D. A. M. J. (2018). *Implementasi Kebijakan Operasional Peningkatan Partisipasi Pria Dalam Program Keluarga Berencana Di Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.* JI@ P, 5(1).
- Sutinah, S. (2017). *Partisipasi laki-laki dalam program Keluarga Berencana di era masyarakat postmodern.* Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 30(3), 290-299.
- Topatimangsang, dkk. 2016. *Mengubah Kebijakan Publik : Panduan Pelatihan Advokasi.* Yogyakarta : INSISTPress
- Yustianingsih, Y., dkk. 2014. *Studi Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana di Kecamatan Tugu Kota Semarang.* Journal of Public Policy and Management Review, 3(2), 224-233.